

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

#### 5.1.1. Kesimpulan Analisis factor-faktor yang mempengaruhi produksi perikanan ditinjau secara makro dalam penentuan sector basis dan no basis serta kebijakan sub sector perikanan budidaya di Provinsi Riau.

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil analisis LQ, perikanan tangkap menjadi sector basis di Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai, Siak, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kepulauan Meranti sementara perikanan budidaya menjadi sector basis bagi Kabupaten Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, Kuansing dan Pekanbaru.
2. Faktor internal dalam pengembangan usaha budidaya di Propinsi Riau adalah Sumberdaya manusia dalam usia produktif, Peningkatan produksi perikanan budidaya, Bahan baku diperoleh dari usaha sendiri, Kebijakan Pemerintah. Untuk lingkungan Eksternal adalah pasar dan ekonomi.

#### 5.1.2. Kesimpulan Analisis Pengaruh Kebijakan dan Strategi Pengembangan Terhadap Pembangunan Perikanan di Propinsi Riau

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil analisis model ekonometrika, produksi perikanan tangkap dipengaruhi oleh luas perairan umum dan keberadaan TPI dan PPI, sementara produksi perikanan budidaya dipengaruhi oleh jumlah rumah tangga budidaya dan produksi benih ikan.
2. Berdasarkan hasil perhitungan prioritas strategi melalui rangking, tiga alternative strategi dengan nilai tertinggi adalah:
  - a. Perberdayaan kelompok nelayan melalui penguatan kelembagaan

- b. Revitalisasi peran penyuluh
- c. Optimalisasi produksi untuk memenuhi permintaan pasar

### **5.1.3. Kesimpulan Analisis Indikator Makro dan Kelembagaan, Faktor-Faktor Penentu Pembangunan Perikanan Propinsi Riau**

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil analisis daya saing (*shift share*) menunjukkan bahwa sector perikanan kabupaten Bengkalis, Siak, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru berada pada kuadran I yang artinya pertumbuhannya cepat namun relative tidak berdaya saing, sementara Kabupaten Rokan Hilir, Dumai, Rokan Hulu, Kuansing dan Kepulauan Meranti berada pada kuadran III yang artinya pertumbuhan sector perikanan lambat dan relative tidak berdaya saing.
2. Hasil analisis *stakeholder* menetapkan beberapa *stakeholder* primer yang akan diikut sertakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan perikanan berkelanjutan di Propinsi Riau. *Stakeholder* primer dalam pembangunan perikanan berkelanjutan di Riau adalah Pemda, DKP ((Dinas Kelautan dan Perikanan) , Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB). *Stakeholder* primer yang diperoleh pada tahapan analisis ini memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam rangka menjawab tantangan pembangunan perikanan berkelanjutan di Riau.

## 5.2. Saran

1. Hampir di semua kabupaten sector perikanan menjadi sector basis perekonomian namun relative tidak berdaya saing sehingga dibutuhkan usaha untuk meningkatkan penyediaan inrastruktur pendukung pembangunan perikanan.
2. Keberadaan fasilitas TPI, PPI, jumlah rumahtangga budidaya, produksi benih ikan berpengaruh terhadap produksi perikanan sehingga dibutuhkan dukungan pemerintah untuk penyediaan sarana tersebut dan mendukung masyarakat untuk melakukan budidaya perikanan.